



Judul : Indonesia Darurat Kekerasan Seksual : PRIMA Janji Kawal Terus Pembahasan RUU TPKS
Tanggal : Minggu, 23 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual PRIMA Janji Kawal Terus Pembahasan RUU TPKS

PARTAI Rakyat Adil Makmur (PRIMA) berjanji akan terus mengawal Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) hingga disahkan. Ini untuk menjawab penantian perjuangan gerakan perempuan sejak tujuh tahun lalu.

“Ini muara perjuangan Gerakan Perempuan dan para korban kekerasan seksual selama tujuh tahun terakhir,” ujar Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat PRIMA Bidang Perempuan dan Kesejahteraan Sosial, Minaria Christyn, kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Menurutnya, meskipun PRIMA merupakan partai baru dan belum berada di Senayan, namun perjuangan terhadap kaum perempuan tetap disuarakan. Termasuk, konsistensi mengawal RUU TPKS hingga menjadi regulasi perlindungan perempuan.

PRIMA, katanya, mengapresiasi parpol di Senayan yang menyetujui RUU TPKS ini sebagai RUU inisiatif DPR. Keputusan itu, dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (18/2) lalu.

Terlepas perdebatan isi RUU TPKS, Minaria mengatakan, kehadiran regulasi ini sudah sangat mendesak untuk masyarakat, terutama para perempuan. Baginya, saat ini, Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan seksual.

Indikasinya adalah lonjakan jumlah laporan dan kompleksitas kasus yang menimpa perempuan dan anak-anak. Tidak sedikit, mereka yang

tertekan dan merasa tanpa perlindungan kekerasan seksual memilih jalan terlarang. Misalnya, bunuh diri.

“Kasus-kasus seperti korban kekerasan seksual yang bunuh diri di Jawa Timur, atau juga pemerkosaan terhadap anak-anak di institusi pendidikan dasar baru-baru ini, sangat memukul kita semua,” sebutnya.

Melihat kondisi tersebut, keberadaan RUU TPKS menjadi sangat penting menjadi tumpuan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan bagi para korban kekerasan seksual.

Meski begitu, ingat Minaria, RUU TPKS nanti harus berkualitas. Hal itu, bisa ditempuh dengan memberikan ruang bagi partisipasi publik. Baginya, para aktivis perempuan, hingga pejuang hak asasi manusia tentu bersedia berbagi ilmu dan pengalamannya di lapangan.

Dengan melibatkan partisipasi publik, kata dia, dipastikan bisa memenuhi hak korban atas keadilan dan pemulihan, serta menguatkan keterhubungan sistem peradilan pidana yang terpadu dengan sistem pelayanan pemulihan.

“PRIMA sebagai partainya rakyat biasa yang peduli pada isu perempuan mengajak rakyat Indonesia, organisasi kemasyarakatan dan kelompok rentan lainnya untuk terus mengawal dan berpartisipasi dalam proses pembahasan hingga RUU TPKS ini disahkan menjadi undang-undang,” pungkasnya. ■ BSH